**TRACK: Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi, dan Entrepreneurship** | Vol. 05, No. 01 | **APRIL 2026**
e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

# *POST-POWER SYNDROME* DALAM KEPEMIMPINAN KRISTEN: SEBUAH TINJAUAN TEOLOGIS BIBLIKA TERHADAP TRANSISI KEKUASAAN DAN KERENTANAN SPIRITUAL

**Petrus F. Setiadarma, Eva Kristianti**

***Abstract***

*The phenomenon of post-power syndrome represents a psychosocial challenge that frequently arises when individuals experience the loss of authority and leadership roles, including within Christian leadership contexts. This article aims to examine the phenomenon from a theological and biblical perspective by employing Deuteronomy 31–34 as the primary focus of analysis. The study adopts a qualitative methodology grounded in biblical-theological analysis, incorporating careful textual reading, narrative exegesis, and thematic synthesis within the canonical and theological framework of Scripture. Data sources include biblical texts, biblical-theological literature, and selected studies in leadership psychology relevant to issues of power transition. The findings demonstrate that Moses confronted the transfer of leadership to Joshua without exhibiting identity disorientation or spiritual vulnerability commonly associated with post-power syndrome. These results indicate that spiritual maturity, obedience to the will of God, and an understanding of leadership as a divinely mandated yet temporary calling play a significant role in anticipating post-leadership crises. The article proposes anticipatory measures for Christian leaders, including the cultivation of mature spirituality, the internalization of a service-oriented theology of power, and sustained pastoral accompaniment during periods of leadership transition.*

***Keywords:*** *Post-power syndrome; Christian leadership; biblical-theological analysis; leadership transition; spiritual vulnerability; Deuteronomy 31–34*

**Abstrak**

Fenomena *post-power syndrome* merupakan tantangan psikososial yang kerap muncul ketika individu mengalami kehilangan otoritas dan peran kepemimpinan, termasuk dalam konteks kepemimpinan Kristen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena tersebut secara teologis dan biblika dengan menjadikan Ulangan 31–34 sebagai fokus analisis utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis analisis biblika-teologis, yang mencakup pembacaan teks secara cermat, eksegesis naratif, serta sintesis tematik dalam kerangka kanonik dan teologis Alkitab. Sumber data meliputi teks Alkitab, literatur teologi biblika, dan kajian terpilih dalam bidang psikologi kepemimpinan yang relevan dengan isu transisi kekuasaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Musa menghadapi

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

pengalihan kepemimpinan kepada Yosua tanpa memperlihatkan disorientasi identitas maupun kerentanan spiritual yang lazim dikaitkan dengan *post-power syndrome.* Temuan ini mengindikasikan bahwa kematangan spiritual, ketaatan terhadap kehendak Allah, serta pemahaman kepemimpinan sebagai mandat ilahi yang bersifat sementara berperan signifikan dalam mengantisipasi krisis pascakepemimpinan. Artikel ini mengusulkan langkah-langkah antisipatif bagi pemimpin Kristen, antara lain pembentukan spiritualitas yang matang, internalisasi teologi kekuasaan yang berorientasi pada pelayanan, serta pendampingan pastoral yang berkelanjutan dalam masa transisi kepemimpinan.

**Kata kunci:** Sindrom pasca-kekuasaan; kepemimpinan Kristen; analisis teologis-alkitabiah; transisi kepemimpinan; kerentanan spiritual; Ulangan 31–34

## PENDAHULUAN

Keberadaan seorang pemimpin rohani dalam pelayanan Kristiani, baik di lingkup kegerejaan, lembaga pelayanan sosial, pendidikan, maupun di marketplace dan masyarakat luas, merupakan sebuah keniscayaan (Banks & Ledbetter, 2004; Barna, 1997; Tidball, 2008). Pemimpin tersebut pada umumnya memulai kepemimpinannya dengan bekal teori-teori kepemimpinan yang diperolehnya semasa studi, yang kemudian diimplementasikan dalam menjalankan tugasnya hingga jam terbangnya semakin bertambah dan ia menjadi semakin profesional (Carroll, 2006; Willimon, 2002). Faktor penyertaan Tuhan yang memilih dan menetapkannya serta kerinduannya sendiri untuk menjadi pemimpin yang menjadi berkat akan mendorongnya untuk terus belajar hingga mampu mendaki tangga kepemimpinan sampai ke puncak (Nouwen, 1989; Palmer, 2000).

Ketika kemudian tiba waktunya, baik karena usia, kesehatan, terkena peraturan organisasi, atau penyebab lainnya, ia akan mengakhiri era kepemimpinannya baik secara struktural maupun fungsional dan menyerahkannya kepada penggantinya yang (mungkin) telah dipersiapkan baik olehnya secara internal maupun didatangkan dari luar organisasinya (Frame, 2014; Mulyana, 2018). Terjadilah transisi kepemimpinan dan ia akan "kehilangan" otoritas formalnya. Fenomena yang terjadi secara universal menunjukkan bahwa hal ini merupakan fase kritis yang sering menimbulkan guncangan psikologis, yang dikenal sebagai Sindroma Pasca-kekuasaan atau *Post-Power Syndrome*. Untuk uraian berikutnya digunakan singkatan PPS (Fahrudin et al., 2018; Indarwati et al., 2017). Terdapat beberapa definisi dan pengertian mengenai PPS ini, yaitu

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis atau asal mula kata, maka kata "sindrom" berasal dari akar kata Yunani: *sun* (syn- bersama) dan *dromoj* (dromos - jalur atau lintasan), yang berarti "berjalan bersama" atau "kesamaan," menggambarkan sekelompok tanda/gejala yang muncul bersamaan.

Secara terminologis, istilah sindrom merujuk pada suatu pola kondisi yang terjadi secara bersamaan dan dapat dikenali, meskipun penggunaannya telah meluas dari penyakit tertentu menjadi pola perilaku atau karakteristik umum. Dikaitkan dengan istilah *post-power* atau "pasca-kekuasaan", maka definisi PPS menurut Fahrudin et al. (2018, p. 2) menjadi "sindrom yang terus melekat pada para pensiunan dan pemikiran bahwa ia masih berkuasa, menduduki posisi dengan status dan dihormati oleh teman, keluarga, dan orang lain setelah pensiun." Ada pula yang mendefinisikan *post-power syndrome* sebagai "kumpulan gejala psikologis, emosional, dan perilaku negatif yang dialami seseorang setelah kehilangan posisi kekuasaan, wewenang, dan status yang sebelumnya dipegangnya dalam jangka waktu yang lama" (Fahrudin et al., 2018; Fanan et al., 2021). Gejalanya meliputi: depresi, rasa hampa, mudah marah, sikap sinis, menarik diri dari sosial, nostalgia berlebihan pada masa lalu, serta upaya kompensasi dengan terus mencampuri urusan lama atau menyombongkan pencapaian masa lalu (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019; Sihombing, 2020). Sindrom ini ditandai dengan perasaan kehilangan identitas, pengaruh, akses, dan makna, yang dapat memicu depresi, sikap sinis, atau upaya cawe-cawe bahkan sabotase terhadap penerusnya (Fahrudin et al., 2016).

Kajian-kajian yang ada mengenai *post-power syndrome* hingga saat ini didominasi oleh perspektif psikologis, sosiologis, dan kepemimpinan organisasi, dengan fokus utama pada isu pensiun, hilangnya status jabatan, serta disrupsi identitas personal (Fahrudin et al., 2018; Indarwati et al., 2017). Sementara itu, sejumlah studi tentang transisi kepemimpinan dalam konteks Kristen umumnya menekankan aspek perencanaan suksesi, keberlanjutan organisasi, atau model *servant leadership*, tanpa menjadikan *post-power syndrome* sebagai kategori analitis yang berdiri sendiri (Frame, 2014; Mulyana, 2018; Stevens, 2004). Dapat disebutkan beberapa di antaranya: pertama, Indarwati et al. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analysis of Factors Affecting Post-Power Syndrome and Quality of Life in the Elderly*" menggunakan metode SEM-PLS untuk menganalisis faktor-faktor psikologis yang memengaruhi PPS dan bertujuan menemukan bahwa stres fisiologis, stres psikologis, dan sikap terhadap penuaan berpengaruh

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

signifikan terhadap PPS, serta membuktikan bahwa PPS menurunkan kualitas hidup lansia. Kedua, Fahrudin et al. (2018) dalam "Post-Power Syndrome Among Retirees: A Psychosocial Prevention and Treatment Model" yang dipresentasikan pada The International Conference on Social Science & Education Research (ICSER), berfokus pada dampak psikososial kehilangan jabatan atau pekerjaan pada masa pensiun, dan menjelaskan PPS sebagai reaksi psikologis terhadap hilangnya identitas, status, dan peran sosial. Penelitian tersebut juga mengembangkan model pencegahan dan intervensi psikososial untuk mengatasi PPS.

Ketiga, Fanan et al. (2021) dalam "*Reinforcement Techniques in Overcoming Post-Power Syndrome Anxiety Disorders in the Elderly*" menggunakan metode studi kasus kualitatif pada lansia yang mengalami PPS, dengan menunjukkan bahwa teknik *reinforcement* positif dapat membantu mengurangi kecemasan dan tekanan psikologis akibat kehilangan peran, serta menekankan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pemulihan. Dari ketiga penelitian tersebut, ada beberapa pola psikologis yang secara konsisten muncul berkaitan dengan PPS ini: (1) krisis identitas, yang disebabkan oleh kehilangan jabatan yang diartikan sebagai kehilangan makna diri, status, dan struktur hidup (Fahrudin et al., 2018; Indarwati et al., 2017); (2) stres psikologis, dalam bentuk kecemasan, depresi ringan, perasaan tidak berguna, dan ketakutan akan irrelevansi (Fanan et al., 2021; Sihombing, 2020); (3) perubahan peran sosial, yang terjadi karena berkurangnya interaksi sosial dan hilangnya pengaruh memicu *distress* psikologis (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019); (4) mekanisme koping (*coping mechanism*), yaitu pentingnya dukungan keluarga, aktivitas bermakna, dan intervensi psikososial terbukti membantu pemulihan (Foster, 1998; Prasetyanti & Indriana, 2016).

Di sisi lain, kajian biblika dan teologis telah banyak membahas narasi kepemimpinan dan konsep teologis tentang kekuasaan, namun jarang mengaitkannya secara eksplisit dengan kerentanan psikososial yang muncul setelah berakhirnya otoritas kepemimpinan (Aritonang, 2021; Hartono, 2019; Wijaya, 2017). Dalam konteks Kepemimpinan Rohani, yaitu di tengah pelayanan gerejawi dan kristiani, fenomena ini memiliki dimensi yang unik dan kompleks, karena adanya beberapa pemahaman yang beredar di kalangan pelayanan kristiani itu sendiri, antara lain sebagai berikut: pertama, panggilan sebagai identitas. Peran sebagai gembala, pendeta, atau pemimpin rohani seringkali menyatu dengan identitas diri dan panggilan ilahi, sehingga "melepas jabatan" dapat dirasakan seperti "kehilangan diri" (Nouwen, 1989; Palmer, 2000; Willimon,

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

2002). Kedua, otoritas yang dianggap sakral. Otoritas dalam gereja tidak hanya bersifat struktural tetapi juga karismatik dan spiritual, membuat proses pelepasan menjadi lebih sensitif (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977; Weber, 1978). Ketiga, budaya dan ekklesiologi. Struktur pemerintahan gereja (episkopal, presbiterian, kongregasional, independen) dan budaya komunitas sangat memengaruhi dinamika suksesi dan penerimaan status "mantan pemimpin" (Barna, 1997; Carroll, 2006; Tidball, 2008).

Hal tersebut menunjukkan bahwa PPS tidak hanya berkaitan dengan masalah psikologis melainkan juga teologis, yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang bersifat lebih menyeluruh (O'Neill, 2015; Reid, 1997). Munculnya PPS yang tidak terkelola dapat merusak kesehatan mental pemimpin itu sendiri, mengganggu stabilitas organisasi gereja, menciptakan polarisasi jemaat, serta menjadi batu sandungan bagi kesaksian komunitas Kristen (Chandler, 2009; Hartono, 2019). Meskipun hal ini sangat penting, namun literatur yang secara khusus dan sistematis membahas tentang PPS pasca-masa jabatan dalam konteks kepemimpinan Kristen masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Bisa disebutkan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prasetyanti dan Indriana (2016) yang meneliti korelasi antara tingkat religiositas dengan PPS yang memberikan hasil bahwa semakin tinggi religiositasnya maka semakin rendah kecenderungan PPS-nya. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam mengintegrasikan fenomena *post-power syndrome* dengan analisis biblika-teologis, khususnya melalui keterlibatan eksegetis yang mendalam terhadap narasi kanonik mengenai transisi kepemimpinan (Longenecker, 2004; Pratt, 1993). Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menerapkan analisis biblika-teologis atas Ulangan 31–34 (Brueggemann, 2001; Craigie, 1976; Tigay, 1996; Wright, 2004) untuk merumuskan kerangka teologis yang bersifat normatif dan antisipatif dalam menghadapi kerentanan pascakepemimpinan dalam konteks kepemimpinan Kristen. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi orisinal melalui dialog interdisipliner antara psikologi kepemimpinan dan teologi biblika yang sejauh ini masih minim dalam khazanah akademik (Banks & Ledbetter, 2004; Peterson, 2002).

Tujuan penulisan artikel ini adalah: pertama, menganalisis fenomena *post-power syndrome* secara biblika-teologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *post-power syndrome* dalam kepemimpinan Kristen melalui pendekatan analisa biblika-teologis, dengan menelaah narasi transisi kepemimpinan dalam

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

Ulangan 31–34 (Craigie, 1976; Wright, 2004). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip teologis mengenai kekuasaan, panggilan, dan ketaatan yang relevan dalam menghadapi berakhirnya otoritas kepemimpinan (Greenleaf, 1977; Wijaya, 2017). Kedua, mengidentifikasi faktor spiritual dan teologis yang bersifat antisipatif terhadap PPS. Tujuan ini berkaitan dengan mengidentifikasi faktor-faktor spiritual dan teologis yang berperan dalam mencegah munculnya kerentanan pascakepemimpinan, khususnya yang berkaitan dengan disorientasi identitas dan krisis spiritual (Foster, 1998; Peterson, 2002). Fokus diarahkan pada pembentukan spiritualitas pemimpin, pemahaman kepemimpinan sebagai mandat ilahi yang temporer, serta relasi yang sehat antara panggilan dan kekuasaan (Nouwen, 1989; Palmer, 2000).

Ketiga, merumuskan kerangka teologis-normatif bagi pendampingan kepemimpinan Kristen pascatransisi. Artikel ini juga bertujuan untuk merumuskan suatu kerangka teologis-normatif yang dapat digunakan sebagai dasar refleksi dan praktik pendampingan pastoral bagi pemimpin Kristen yang sedang atau telah mengalami transisi kekuasaan (Carroll, 2006; Reid, 1997; Stevens, 2004). Kerangka ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teologi kepemimpinan Kristen yang responsif terhadap isu PPS dalam konteks gereja dan pelayanan kontemporer (Tidball, 2008; Willimon, 2002).

Menurut hemat penulis, penelitian ini memiliki sejumlah signifikansi, yakni: pertama, mengisi kesenjangan kajian antara *post-power syndrome* dan Teologi Biblika. Penelitian ini secara langsung menjawab kesenjangan penelitian yang ada dengan mengintegrasikan fenomena PPS, yang selama ini dikaji terutama dalam perspektif psikologi dan kepemimpinan organisasi (Fahrudin et al., 2018; Indarwati et al., 2017), ke dalam analisis biblika-teologis. Dengan menjadikan Ulangan 31–34 sebagai teks utama, penelitian ini menghadirkan kontribusi orisinal yang selama ini belum banyak dikembangkan dalam kajian teologi kepemimpinan Kristen (Brueggemann, 2001; Craigie, 1976; Tigay, 1996). Kedua, memperkuat kerangka teologis antisipatif terhadap kerentanan pasca kepemimpinan.

Sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor spiritual dan teologis yang bersifat antisipatif, penelitian ini menawarkan kerangka teologis normatif yang menekankan kepemimpinan sebagai mandat ilahi yang bersifat sementara (Banks & Ledbetter, 2004; Wright, 2004). Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana kematangan spiritual dan ketaatan

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

kepada kehendak Allah berperan dalam mencegah krisis identitas dan kerentanan spiritual pascakepemimpinan (Foster, 1998; Nouwen, 1989). Ketiga, menyumbang pendekatan biblika dalam refleksi transisi Kepemimpinan Kristen. Penelitian ini memperluas refleksi teologis tentang transisi kepemimpinan dengan menghadirkan analisis naratif Musa sebagai model biblika yang relevan (Longenecker, 2004; Pratt, 1993). Hal ini selaras dengan tujuan penelitian untuk menganalisis fenomena PPS secara biblika-teologis, sekaligus memperkaya diskursus akademik tentang kepemimpinan Kristen dengan basis eksegetis yang kuat (Aritonang, 2021; Wijaya, 2017). Keempat, memberikan landasan normatif bagi praktik pendampingan Kepemimpinan Kristen. Selaras dengan tujuan penelitian untuk merumuskan kerangka teologis bagi pendampingan pemimpin Kristen pascatransisi, penelitian ini menyediakan dasar reflektif dan aplikatif bagi gereja dan lembaga Kristen (Carroll, 2006; Peterson, 2002; Stevens, 2004). Signifikansi ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan praktik pendampingan pastoral dan pembinaan kepemimpinan yang peka terhadap kerentanan spiritual akibat berakhirnya otoritas kepemimpinan (Klaassen & McDonald, 2019; O'Neill, 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan analisis biblika-teologis untuk mengkaji fenomena PPS dalam kepemimpinan Kristen (Longenecker, 2004; Pratt, 1993). Fokus tekstual utama penelitian ini adalah Ulangan 31–34, yang memuat narasi transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua dan merepresentasikan contoh kanonik tentang peralihan kepemimpinan yang ditandai oleh kedewasaan spiritual dan intensionalitas teologis (Craigie, 1976; Tigay, 1996; Wright, 2004). Pemilihan kitab Ulangan sebagai fokus utama didasarkan pada signifikansinya sebagai dokumen perjanjian yang mengatur kehidupan dan kepemimpinan umat Israel, sekaligus karena narasi penutup kepemimpinan Musa menawarkan model teologis yang unik tentang pelepasan otoritas (Brueggemann, 2001; Tidball, 2008). Analisis dilakukan melalui integrasi eksegesis naratif dan sintesis tematik (Pratt, 1993). Pertama, teks dianalisis dalam konteks sastra dan kanoniknya untuk mengidentifikasi fungsi teologisnya dalam Pentateukh (Longenecker, 2004; Wright, 2004). Kedua, unsur-unsur naratif utama—seperti karakterisasi tokoh, ujaran, dan alur peristiwa—dikaji untuk memahami

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

respons Musa terhadap berakhirnya otoritas kepemimpinannya (Craigie, 1976; Brueggemann, 2001).

Ketiga, tema-tema teologis utama, termasuk panggilan ilahi, sifat temporer kekuasaan, ketaatan, dan keberlanjutan misi Allah, diidentifikasi dan disintesiskan (Tigay, 1996; Greenleaf, 1977; Banks & Ledbetter, 2004). Temuan eksegetis selanjutnya ditafsirkan secara normatif untuk merumuskan prinsip-prinsip teologis yang relevan bagi kepemimpinan Kristen kontemporer, khususnya dalam mengantisipasi kerentanan spiritual yang berkaitan dengan *post-power syndrome* (Longenecker, 2004; Nouwen, 1989; Peterson, 2002). Validitas teologis dijaga melalui dialog kritis dengan literatur biblika dan kajian kepemimpinan yang bereputasi, termasuk karya-karya tentang transisi kepemimpinan dalam konteks gereja (Frame, 2014; Mulyana, 2018; Stevens, 2004) serta studi tentang kesehatan mental dan spiritualitas pelayan gereja (Sihombing, 2020; Klaassen & McDonald, 2019). Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan pembacaan teologis yang bertanggung jawab secara eksegetis, tetapi juga relevan secara pastoral bagi konteks kepemimpinan Kristen masa kini (Carroll, 2006; Willimon, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pemahaman psikologis, *post-power syndrome* merupakan konstruk psikososial yang dapat dijelaskan oleh integrasi beberapa teori yang sudah mapan. Teori-teori yang digunakan dalam memahami *post-power syndrome* meliputi teori identitas sosial dan peran, teori kekuasaan (*approach–inhibition theory of power*), teori penyesuaian hedonik dan perbandingan sosial, teori kebutuhan dasar manusia, teori kehilangan dan berduka, teori kontrol dan ketidakberdayaan yang dipelajari, serta perspektif psikodinamika tentang *narcissistic injury* (Fahrudin et al., 2016; Indarwati et al., 2017; Chandler, 2009). Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut diperoleh kerangka menyeluruh yang terintegrasi mengenai PPS. PPS paling baik dipahami sebagai krisis multidimensional yang dipicu oleh kehilangan posisi kekuasaan: (1) identitas inti, yang terbangun sekitar jabatan itu runtuh; (2) sistem motivasi berubah dari pendekatan menjadi penghambatan; (3) kebutuhan psikologis dasar (otonomi, kompetensi, hubungan) tidak terpenuhi; (4) individu mengalami proses berduka yang tidak tuntas atas kehilangan tersebut; (5) harga diri mengalami cedera narsistik yang dalam, memicu mekanisme

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

pertahanan yang maladaptif; dan (6) kegagalan untuk beradaptasi dan merasa kehilangan kendali yang memperparah kondisi (Fahrudin et al., 2018; Fanan et al., 2021; Sihombing, 2020).

Dalam konteks teologis yang berkenaan dengan Kepemimpinan Kristen, Alkitab menegaskan bahwa otoritas kepemimpinan berasal dari Allah dan bersifat delegatif serta sementara (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977; Weber, 1978). Transisi kepemimpinan Musa kepada Yosua (Ul. 31:7–8; 34:9) menunjukkan bahwa pelepasan kekuasaan merupakan tindakan ketaatan teologis, bukan kegagalan (Craigie, 1976; Wright, 2004). Ketegangan yang muncul dalam PPS sering berkaitan dengan identitas diri yang melekat pada jabatan, padahal Alkitab menegaskan bahwa identitas manusia berakar pada relasi dengan Allah, bukan pada posisi atau kuasa (Nouwen, 1989; Palmer, 2000; Willimon, 2002). Secara khusus, Ulangan 31–34 menyajikan paradigma kepemimpinan rohani yang matang dan reflektif, khususnya dalam konteks transisi dan pelepasan kekuasaan (Brueggemann, 2001; Tigay, 1996). Narasi penutup kepemimpinan Musa tidak digambarkan sebagai krisis identitas, melainkan sebagai puncak ketaatan dan kedewasaan spiritual. Hal ini menjadikan teks ini relevan sebagai fondasi biblika untuk merespons PPS dalam kepemimpinan Kristen (Wright, 2004; Tidball, 2008).

Pernyataan Musa, "... I can no more go out and come in: ..." (Ul. 31:2 - KJV)—sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan selanjutnya berada dalam kedaulatan Allah, bukan dalam ambisi personal (Craigie, 1976; Wright, 2004). Frasa ini menandai batas ilahi atas masa kepemimpinannya. Ungkapan ini menegaskan bahwa otoritas kepemimpinan bersifat temporer dan berada di bawah kedaulatan Allah. Secara teologis, pelepasan jabatan bukan kehilangan panggilan, melainkan ketaatan pada kehendak Allah (Brueggemann, 2001; Tigay, 1996). Teks ini menekankan bahwa otoritas kepemimpinan bersifat delegatif dan sementara. Musa tidak hanya menerima keputusan Allah mengenai akhir kepemimpinannya (Ul. 31:14), tetapi juga secara aktif meneguhkan Yosua di hadapan umat (Ul. 31:7–8). Tindakan ini menunjukkan bahwa pelepasan kekuasaan merupakan ekspresi ketaatan dan iman, bukan kegagalan atau pengunduran diri yang pasif (Wright, 2004; Stevens, 2004). Perspektif ini secara langsung menantang kecenderungan PPS yang muncul ketika identitas diri dilekatkan secara absolut pada jabatan (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019).

Lebih lanjut, Ulangan 31:8 menegaskan Allah sebagai pemimpin utama

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

umat: "TUHAN, Dialah yang berjalan di depanmu." Dalam konteks PPS, narasi ini menawarkan paradigma teologis preventif: Musa tidak mempertahankan kekuasaan, tidak menegosiasikan status pasca kepemimpinan, dan tidak mengalami disorientasi identitas (Brueggemann, 2001; Wright, 2004). Identitas Musa tetap utuh sebagai hamba TUHAN (Ul. 34:5), meskipun ia tidak memasuki Tanah Perjanjian. Hal ini menegaskan bahwa nilai dan identitas pemimpin ditentukan oleh kesetiaan pada panggilan Allah, bukan oleh durasi atau puncak kekuasaan yang dicapai (Tigay, 1996; Nouwen, 1989). Dengan demikian, kontinuitas umat Allah tidak bergantung pada Musa sebagai pemimpin karismatik, melainkan pada kesetiaan Allah terhadap perjanjian-Nya (Brueggemann, 2001; Banks & Ledbetter, 2004). Dalam Ulangan 34, kematian Musa dipaparkan tanpa krisis institusional, karena legitimasi kepemimpinan Yosua telah diteguhkan melalui penumpangan tangan dan pengakuan komunitas (Ul. 34:9) (Craigie, 1976; Tigay, 1996). Jadi, kepemimpinan manusia bersifat representatif dan instrumental. Dengan demikian, keberlanjutan misi Allah tidak bergantung pada figur tertentu. Kesadaran ini berfungsi sebagai faktor protektif terhadap kecemasan, kontrol berlebihan, dan ketidakmampuan melepaskan kekuasaan, yang merupakan indikator umum PPS (Foster, 1998; Peterson, 2002).

Penguatan Musa kepada Yosua menggunakan dua istilah penting, *ḥāzaq* dan *ʾāmēṣ* (Ul. 31:7), yang menekankan keteguhan batin dan keberanian moral (Wright, 2004; Tigay, 1996). Kepemimpinan rohani bukan sekadar soal kompetensi, tetapi formasi karakter (Banks & Ledbetter, 2004; Carroll, 2006). Penumpangan tangan kepada Yosua (Ul. 34:9) dan pemberian *rûaḥ ḥokmāh* (roh hikmat) menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan berasal dari Allah, bukan dari klaim personal atas kekuasaan (Craigie, 1976; Greenleaf, 1977). Penutup kitab menyebut Musa sebagai *ʿeved YHWH*—hamba TUHAN (Ul. 34:5). Identitas ini tetap utuh bahkan setelah Musa tidak lagi memimpin (Brueggemann, 2001; Wright, 2004). Dalam kerangka preventif PPS, teks ini menegaskan pemisahan teologis antara jabatan dan identitas diri, serta pemaknaan panggilan pascakepemimpinan sebagai bagian dari kesetiaan (Nouwen, 1989; Palmer, 2000). Dengan demikian, Ulangan 31–34 menyediakan kerangka biblika-teologis yang kuat untuk memahami transisi kepemimpinan sebagai bagian integral dari spiritualitas kepemimpinan, serta sebagai antitesis teologis terhadap dinamika PPS (Reid, 1997; Stevens, 2004). Keempat pasal tersebut membentuk model kepemimpinan rohani yang preventif terhadap PPS dengan menegaskan temporeritas otoritas, keberlanjutan misi Allah,

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

legitimasi ilahi, dan identitas pemimpin sebagai hamba (Wright, 2004; Tidball, 2008). Model ini mendorong pelepasan kekuasaan yang sehat, stabilitas identitas pascakepemimpinan, serta ketahanan spiritual dalam transisi kepemimpinan gereja (Carroll, 2006; Peterson, 2002).

Untuk lebih jelasnya, kata-kata Ibrani kunci dalam Kitab Ulangan 31-34 dan implikasinya bagi Kepemimpinan guna mencegah terjadinya PPS dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

| KATA IBRANI | MAKNA | IMPLIKASI KEPEMIMPINAN |
|---|---|---|
| יָכֹל (yākōl) | Mampu berkuasa | Otoritas memiliki batas ilahi; pelepasan jabatan adalah ketaatan. |
| הוּא הַהֹלֵךְ לְפָנֶיךָ | Dia yang berjalan di depan | Allah adalah pemimpin utama; mencegah absolutisasi diri. |
| חָזַק (ḥāzaq) | Menjadi kuat | Keteguhan spiritual menghadapi transisi. |
| אָמֵץ (ʾāmēṣ) | Berani, teguh batin | Keberanian melepaskan kontrol. |
| חָכְמָה (rûaḥ ḥokmāh) | Roh hikmat | Legitimasi rohani, bukan ambisi personal. |
| יְהוָה (ʿeved YHWH) | Hamba TUHAN | Identitas tidak bergantung pada jabatan. |

Sebagai pembanding, dalam Perjanjian Baru, teladan Yohanes Pembaptis yang menyatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil" (Yoh. 3:30), serta ajaran Yesus tentang kepemimpinan sebagai pelayanan (Mrk. 10:42–45), menegaskan bahwa pelepasan otoritas merupakan bagian integral dari kesetiaan pada karya Allah (Greenleaf, 1977; Banks & Ledbetter, 2004; Wijaya, 2017). Paulus juga memandang pelayanannya sebagai partisipasi dalam karya Allah yang melampaui individu tertentu (1 Kor. 3:5–7; Flp. 3:7–8). Dengan demikian, rekontekstualisasi teologis atas PPS mengarahkan pemahaman bahwa kehilangan kekuasaan dalam kepemimpinan Kristen bukanlah kehilangan makna, melainkan fase pembentukan rohani yang menegaskan kedaulatan Allah dan keberlanjutan panggilan dalam misi-Nya (Willimon, 2002; Peterson, 2002).

Bagaimana dengan relasi antara Kekuasaan, Panggilan, dan Identitas dalam Kepemimpinan Alkitabiah? Teologi Alkitab secara tegas membedakan antara kekuasaan, panggilan ilahi, dan identitas diri. Otoritas kepemimpinan dipahami sebagai mandat Allah yang bersifat delegatif dan temporer, bukan sebagai

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

atribut permanen identitas personal (Banks & Ledbetter, 2004; Wright, 2004; Weber, 1978). Sebaliknya, identitas pemimpin berakar pada relasinya dengan Allah sebagai ciptaan dan umat perjanjian, bukan pada jabatan yang diemban (Nouwen, 1989; Palmer, 2000; Willimon, 2002). Risiko PPS muncul ketika jabatan kepemimpinan disamakan dengan panggilan dan identitas diri (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019). Alkitab menantang reduksi ini dengan menegaskan bahwa panggilan ilahi bersifat berkelanjutan dan dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk pelayanan (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977). Yesus sendiri menafsirkan kepemimpinan sebagai pelayanan, bukan dominasi, sehingga pelepasan otoritas tidak identik dengan kehilangan makna atau identitas (Wijaya, 2017; Aritonang, 2021). Dengan demikian, pembedaan teologis antara kekuasaan yang temporer dan identitas yang berakar pada panggilan Allah menjadi kunci untuk mencegah disorientasi identitas pascakepemimpinan (Foster, 1998; Peterson, 2002).

Selanjutnya penulis memaparkan sejumlah bentuk kerentanan spiritual dan faktor teologis yang bersifat preventif. Transisi kepemimpinan dalam konteks Kristen sering kali memunculkan kerentanan spiritual yang berkelindan langsung dengan indikator PPS (Hartono, 2019; O'Neill, 2015). Kelekatan yang tidak sehat pada jabatan dan pengaruh dapat termanifestasi dalam resistensi terhadap suksesi, kesulitan melepaskan kontrol, serta kecenderungan mendefinisikan diri berdasarkan peran yang telah berlalu (Frame, 2014; Mulyana, 2018). Secara spiritual, kondisi ini tampak dalam menurunnya kerendahan hati, munculnya kepahitan, dan berkurangnya keterbukaan terhadap karya Allah yang berlanjut melalui pemimpin lain (Reid, 1997; Stevens, 2004). Indikator PPS seperti kecemasan, kehilangan makna, dan penarikan diri dari komunitas juga berkaitan dengan melemahnya praktik pembentukan rohani (Sihombing, 2020; Klaassen & McDonald, 2019). Ketika identitas pemimpin terlalu terikat pada otoritas struktural, pelepasan jabatan dapat memicu krisis spiritual yang ditandai oleh berkurangnya doa, ketaatan, dan kepercayaan kepada kedaulatan Allah (Foster, 1998; Nouwen, 1989). Sebaliknya, teladan Musa yang menerima akhir kepemimpinannya dan meneguhkan Yosua (Ul. 31:7–8) menunjukkan bahwa ketaatan dan kerendahan hati berfungsi sebagai faktor preventif terhadap disorientasi spiritual pascakepemimpinan (Craigie, 1976; Wright, 2004).

Lebih lanjut, ketidakmampuan mempercayai keberlanjutan karya Allah merupakan indikator spiritual PPS yang signifikan (Fahrudin et al., 2018; Prasetyanti

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

& Indriana, 2016). Alkitab menegaskan bahwa pertumbuhan dan keberhasilan pelayanan tidak bergantung pada figur pemimpin, melainkan pada karya Allah sendiri (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977). Yesus juga menegaskan bahwa nilai sejati pelayanan terletak pada kesetiaan, bukan pada pengakuan atau posisi (Wijaya, 2017; Aritonang, 2021). Dengan demikian, pembentukan spiritual yang menekankan ketaatan, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Allah menjadi strategi teologis preventif dalam menghadapi PPS (Foster, 1998; Peterson, 2002; Willimon, 2002). Jelas bahwa otoritas seorang pemimpin bersifat temporer, sedangkan misi Allah terus berlanjut. Teologi biblika memandang otoritas kepemimpinan sebagai mandat Allah yang bersifat sementara dan instrumental, bukan sebagai kepemilikan personal atau identitas permanen (Banks & Ledbetter, 2004; Wright, 2004; Weber, 1978). Narasi Alkitab secara konsisten menegaskan bahwa misi Allah berlanjut melampaui figur pemimpin tertentu, sebagaimana terlihat dalam transisi Musa–Yosua dan kesinambungan karya Allah dalam sejarah keselamatan (Brueggemann, 2001; Tigay, 1996). Perspektif ini berlawanan dengan model kepemimpinan modern yang cenderung mengabsolutkan posisi, pengaruh, dan kontrol personal (Barna, 1997; Carroll, 2006). Ketika otoritas dipersepsikan sebagai hak permanen, pelepasan jabatan sering memicu krisis makna dan kehilangan identitas yang menjadi indikator PPS (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019). Sebaliknya, pemahaman teologis bahwa Allah adalah subjek utama misi dan pertumbuhan memungkinkan pemimpin menjalani transisi secara sehat, dengan kepercayaan bahwa karya Allah tidak bergantung pada keberlangsungan kekuasaan personal (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977).

Berdasarkan analisis biblika-teologis di atas, maka dalam praktik Kepemimpinan Kristen kontemporer masa kini perlu dipandu oleh prinsip normatif yang menempatkan suksesi dan pelepasan kepemimpinan sebagai bagian integral dari panggilan rohani (Frame, 2014; Mulyana, 2018; Stevens, 2004). Alkitab menegaskan bahwa kepemimpinan yang sehat mencakup kesiapan untuk mempersiapkan penerus dan melepaskan otoritas secara bertanggung jawab dalam ketaatan kepada kehendak Allah (Ul. 31:7–8) (Craigie, 1976; Wright, 2004). Praktik ini mencegah personalisasi kekuasaan dan meminimalkan risiko PPS (Tidball, 2008; Carroll, 2006). Selain itu, pemaknaan panggilan pascakepemimpinan perlu ditegaskan secara teologis, sehingga transisi tidak dipahami sebagai akhir pelayanan, melainkan sebagai transformasi bentuk keterlibatan dalam misi Allah

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

(Nouwen, 1989; Palmer, 2000). Dengan demikian, kepemimpinan Kristen dipanggil untuk membangun struktur, spiritualitas, dan budaya gereja yang meneguhkan kontinuitas misi Allah sekaligus menjaga kesehatan rohani pemimpin (Banks & Ledbetter, 2004; Carroll, 2006; Peterson, 2002).

Temuan penelitian ini memiliki implikasi pastoral dan ekklesial yang signifikan, khususnya dalam pembinaan pemimpin dan pengelolaan transisi kepemimpinan gereja (O'Neill, 2015; Hartono, 2019; Reid, 1997). Gereja dipanggil untuk mengembangkan pembinaan kepemimpinan yang menekankan pembentukan spiritual, kerendahan hati, dan kesiapan untuk melepaskan jabatan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah (Greenleaf, 1977; Wijaya, 2017; Foster, 1998). Pendampingan pascatransisi juga perlu dilakukan secara *intentional* melalui bimbingan pastoral, komunitas rohani, dan peneguhan panggilan pascakepemimpinan, guna mencegah isolasi, kepahitan, dan disorientasi identitas yang menjadi indikator PPS (Peterson, 2002; Klaassen & McDonald, 2019; Sihombing, 2020). Secara ekklesial, gereja perlu membangun budaya suksesi yang sehat dan transparan, sehingga transisi kepemimpinan tidak dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai kesinambungan misi Allah yang dikerjakan bersama oleh seluruh tubuh Kristus (Banks & Ledbetter, 2004; Carroll, 2006; Tidball, 2008).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *post-power syndrome* (PPS) dalam kepemimpinan Kristen tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan psikologis, melainkan memerlukan rekontekstualisasi biblika-teologis yang memperhatikan relasi antara panggilan, otoritas, identitas, dan pembentukan spiritual (Banks & Ledbetter, 2004; Nouwen, 1989; Peterson, 2002). Menjawab *research gap* yang telah diidentifikasi—yakni ketiadaan kerangka normatif teologis dalam kajian PPS—artikel ini menunjukkan bahwa Alkitab secara konsisten memandang otoritas sebagai mandat yang bersifat sementara dan instrumental, sementara misi Allah berlanjut melampaui figur kepemimpinan tertentu (Wright, 2004; Brueggemann, 2001; Greenleaf, 1977). Melalui analisis biblika-teologis terhadap Ulangan 31–34, penelitian ini menegaskan bahwa transisi kepemimpinan merupakan tindakan ketaatan dan kedewasaan rohani,

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

bukan kegagalan institusional (Craigie, 1976; Tigay, 1996; Tidball, 2008). Temuan ini juga menunjukkan bahwa PPS berkaitan erat dengan disorientasi identitas ketika jabatan kepemimpinan disamakan dengan panggilan ilahi (Chandler, 2009; Klaassen & McDonald, 2019; Sihombing, 2020). Sebaliknya, teologi Alkitab menegaskan bahwa panggilan Allah bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada jabatan tertentu (Palmer, 2000; Willimon, 2002; Carroll, 2006).

Penelitian ini mengidentifikasi kerendahan hati, ketaatan, kepercayaan pada kedaulatan Allah, dan pembentukan spiritual yang berkelanjutan sebagai faktor teologis preventif terhadap PPS (Foster, 1998; Reid, 1997; Stevens, 2004). Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada kajian kepemimpinan Kristen dengan menjembatani pendekatan psikologis dan teologis secara normatif dan aplikatif (Fahrudin et al., 2018; Indarwati et al., 2017; Fanan et al., 2021). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris penerapan kerangka teologis ini dalam berbagai konteks gerejawi (Frame, 2014; Mulyana, 2018; O'Neill, 2015).

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penting dapat diajukan. Pertama, bagi pemimpin gereja: mengembangkan spiritualitas kepemimpinan yang membedakan secara sehat antara panggilan, jabatan, dan identitas diri, serta mempersiapkan diri secara rohani untuk fase pascakepemimpinan sejak dini (Nouwen, 1989; Peterson, 2002; Foster, 1998). Kedua, bagi gereja dan lembaga Kristen: merumuskan kebijakan suksesi dan pelepasan kepemimpinan yang jelas, teologis, dan pastoral, termasuk pendampingan terstruktur bagi pemimpin yang memasuki masa transisi (Carroll, 2006; Tidball, 2008; Hartono, 2019). Ketiga, bagi pembinaan kepemimpinan: mengintegrasikan tema transisi, pelepasan kekuasaan, dan panggilan pascakepemimpinan dalam kurikulum pembentukan pemimpin Kristen (Banks & Ledbetter, 2004; Greenleaf, 1977; Wijaya, 2017). Keempat, bagi penelitian selanjutnya: diperlukan studi empiris dan lintas konteks gerejawi untuk menguji penerapan kerangka teologis ini dalam praktik kepemimpinan Kristen yang beragam (Frame, 2014; Mulyana, 2018; Klaassen & McDonald, 2019). Akhirnya, gereja dipanggil untuk membangun budaya kepemimpinan yang tidak mengabsolutkan jabatan, melainkan menekankan kesetiaan kepada panggilan Allah dan partisipasi dalam misi-Nya yang berkelanjutan (Brueggemann, 2001; Wright, 2004; Willimon, 2002).

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

## DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, D.K. (2021). 'Kepemimpinan Transformasional di Gereja: Antara Visi Ilahi dan Jerat Kuasa', *Jurnal Teologi Cultivation, 5*(1), pp. 1-16.

Banks, R. and Ledbetter, B.M. (2004). *Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches*. Grand Rapids, MI: Baker Academic.

Barna, G. (1997). *Leaders on Leadership: Wisdom, Advice, and Encouragement on the Art of Leading God's People*. Ventura, CA: Regal Books.

Brueggemann, W. (2001). *Deuteronomy*. Nashville, TN: Abingdon Press.

Carroll, J.W. (2006). *God's Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Chandler, D.J. (2009). 'Pastoral Exit: The Dynamics of Pastoral Terminations', *Journal of Psychology and Theology, 37*(2), pp. 95-106.

Craigie, P.C. (1976). *The Book of Deuteronomy*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Fahrudin, A. et al. (2016). 'Dimensi Psikologi Persaraan', *Asian Social Work Journal (ASWJ), 1*(1), pp. 1-8.

Fahrudin, A. et al. (2018). 'Post-Power Syndrome Among Retirees: A Psychosocial Prevention and Treatment Model', *Paper presented at The International Conference on Social Science & Education Research (ICSER)*. Available at: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17429.47840 (Accessed: 7 January 2026).

Fanan, M.A. et al. (2021). 'Reinforcement Techniques in Overcoming Post-Power Syndrome Anxiety Disorders in the Elderly', *Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication, 3*(1), pp. 177-188. Available at: https://doi.org/10.15642/icondac.v3i1.522.

Foster, R.J. (1998). *Celebration of Discipline*. San Francisco, CA: HarperCollins.

Frame, J.M. (2014). 'Leadership Transition in Churches: A Review of Literature', *Journal of Religious Leadership, 13*(2), pp. 33-59.

Greenleaf, R.K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. New York, NY: Paulist Press.

Hartono, B. (2019). 'Spiritual Abuse dalam Kepemimpinan Kristen: Tinjauan Teologis-Praktis', *Jurnal Jaffray, 17*(2), pp. 215-234.

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

Indarwati, R. et al. (2017). 'Analysis of Factors Affecting Post-Power Syndrome and Quality of Life in the Elderly', *Belitung Nursing Journal, 3*(5), pp. 450-461. Available at: https://doi.org/10.33546/bnj.92 (Accessed: 7 January 2026).

Klaassen, D. and McDonald, M. (2019). 'The Wounded Healer and the Challenges of Ending Well: A Qualitative Study of Retired Pastors', *Journal of Spirituality in Mental Health, 21*(3), pp. 196-217.

Longenecker, R.N. (2004). 'Major Tasks of an Evangelical Hermeneutic: Some Observations on Commonalities, Interrelations, and Differences', *Bulletin for Biblical Research, 14*(1), pp. 45-58. Available at: https://doi.org/10.2307/26422692.

Mulyana, A. (2018). 'Manajemen Suksesi Kepemimpinan Gereja: Studi Kasus di Sinode XYZ', *Jurnal Manajemen Pelayanan Gereja, 2*(1), pp. 45-62.

Nouwen, H.J.M. (1989). *In the Name of Jesus: Reflections on Christian Leadership.* New York, NY: Crossroad.

O'Neill, M. (2015). 'The Dark Side of Leadership: Spiritual Abuse and How to Avoid It*', Crux, 51*(3), pp. 20-29.

Palmer, P.J. (2000). *Let Your Life Speak: Listening for the Voice of Vocation*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Peterson, E.H. (2002). *Working the Angles: The Shape of Pastoral Integrity*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Prasetyanti, A. and Indriana, Y. (2016). 'Hubungan Antara Religiusitas dengan Kecenderungan Post-Power Syndrome', *Jurnal E*mpati, 5(2), pp. 241-245.

Pratt, R.L. Jr. (1993). *He Gave Us Stories: The Bible Student's Guide to Interpreting Old Testament Narratives*. Phillipsburg, NJ: P&R Publishing.

Reid, K.E. (1997). 'The Lifelong Practice of Letting Go: A Theological Reflection on Leadership Transition', *The Christian Ministry, 28*(4), pp. 25-28.

Sihombing, E. (2020). 'Burnout dan Kesehatan Mental Pelayan Gereja: Sebuah Tinjauan Sistematis', Psikologika: *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, *25*(1), pp. 1-20.

Stevens, R.P. (2004). 'Finishing Well: The Challenge of Leadership Succession', *Christian Education Journal, 1*(2), pp. 46-61.

e-ISSN 2829-8306 p-ISSN 2829-9108

Tidball, D.J. (2008). *Ministry by the Book: New Testament Patterns for Pastoral Leadership*. Leicester: Apollos.

Tigay, J.H. (1996). *Deuteronomy (JPS Torah Commentary)*. Philadelphia, PA: Jewish Publication Society.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by G. Roth and C. Wittich. Berkeley, CA: University of California Press.

Wijaya, H. (2017). 'Pemimpin Gereja sebagai Hamba: Merekonstruksi Ulang Makna Otoritas dan Pelayanan dalam Terhadap Filipi 2:5-11', *Jurnal Teologi Gracia Deo, 1*(2), pp. 123-140.

Willimon, W.H. (2002). *Pastor: The Theology and Practice of Ordained Ministry*. Nashville, TN: Abingdon Press.

Wright, C.J.H. (2004). *Deuteronomy*. Peabody, MA: Hendrickson.